

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Masalah distribusi pendapatan, kemiskinan dan pengangguran adalah masalah yang paling mudah disulut dan merebak pada permasalahan lain, karena itu harus diwaspadai agar tidak menimbulkan gejolak sosial. Definisi umum tentang kemiskinan adalah bila mana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktifitas maupun usaha menjadi sangat terbatas (Mafruhah, 2009: 1).

Masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan (Suparlan, 1984: 11).

Disisi lain, kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global, Artinya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara di jagat raya ini yang “kebal” dari kemiskinan. Kemiskinan bukan

hanya dijumpai di Indonesia, India, Sri Lanka dan Argentina, melainkan dapat ditemukan di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, maupun Hongaria. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial-ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga dialami oleh negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Kemiskinan tidak memilih tempat dimana dia mau hinggap, tidak peduli negara maju ataupun negara berkembang dan tidak peduli di perkotaan atau di pedesaan. Semua umat manusia di planet ini setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi (Suharto, 2009: 14).

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu masalah nasional yang selalu menjadi tema utama diskusi di kalangan akademisi, praktisi maupun aktivis masyarakat. Padahal fenomena kemiskinan bukanlah fenomena yang baru. Bahkan pada masa pemerintahan colonial pun upaya-upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan telah dilakukan, seperti politik etik, meskipun dengan prioritas kebijakan yang lebih menguntungkan pihak penjajah (Nugroho, 1995: 25).

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh si miskin. Penduduk miskin pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktifitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya. Hal ini menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan

dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun non formal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal yang rendah.

Di Indonesia kemiskinan merupakan masalah kesejahteraan sosial yang melanda masyarakat bangsa sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang. Berlimpahnya kekayaan alam dan lamanya umur negara ternyata tidak menjadi menjamin ataupun berbanding lurus dengan terselesaikannya persoalan kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi disebagian besar masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : *pertama*, kebodohan; tingkat kebodohan seseorang dapat memicu terjadinya kemiskinan. Hal ini karena individu tersebut tidak memiliki pengetahuan atau pendidikan, keterampilan yang memadai yang dapat digunakan untuk mencari penghasilan dan dapat menaikkan taraf hidup individu tersebut serta mampu memenuhi kebutuhannya. *Kedua*, kurangnya tingkat kreativitas individu : jika seseorang dapat menggunakan kreativitasnya, tidak dipungkiri mereka dapat memiliki penghasilan yang dapat menaikkan taraf hidup mereka. Mereka dapat menggunakan sarana prasarana dan segala aspek – aspek yang ada untuk mencari dan mendapatkan sumber penghasilan (<http://gondolsoekotjo.blogspot.com/kemiskinan> sebagai masalah sosial, diakses 23 januari 2014).

Ketiga, tingkat kelahiran yang cukup tinggi; tingkat kelahiran yang tinggi ini juga dapat memicu terjadinya kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya pengeluaran biaya yang lebih besar, sehingga dapat dimungkinkan harta kekayaannya semakin terkuras. *Keempat*, pengaruh lingkungan hidup atau

tempat tinggal; Lingkungan hidup dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Seseorang yang berada di lingkungan miskin pasti akan ikut terbawa arus kemiskinan. Apalagi individu – individu dalam kelompok tersebut adalah individu – individu yang tidak mampu mengurus diri sendiri dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya serta berada dalam gelombang kebodohan. *Kelima*, keturunan : Tingkat ekonomi dari kelompok sosialnya dapat mempengaruhi dengan jelas. Individu yang berasal dari golongan miskin, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan ia ikut miskin. Merasa orang tuanya tidak mampu mencukupi segala kebutuhannya, merekapun menganggap kehidupannya adalah takdir yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga kurang adanya kemauan untuk mengubah keadaannya.

Sebenarnya hidup dalam kemiskinan belum tentu tidak memiliki apa-apa. Manusia dalam kehidupannya juga memiliki asset-aset tertentu dimana asset tersebut juga terwujud didalamnya hak kepemilikan atas suatu barang. Asset merupakan hak atau kalim yang berhubungan dengan properti, baik konkret maupun abstrak (Sherraden 2006: 136).

Salah satu asset yang dimaksud adalah lahan pertanian. Lahan pertanian juga merupakan salah satu asset yang dimiliki oleh sebagian masyarakat yang bekerja sebagai petani. Khususnya masyarakat yang tinggal di daerah perkampungan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kampung memiliki lahan pertanian. Meskipun demikian, belum tentu semua petani yang memiliki lahan terbebas dari jeratan hidup miskin.

Salah satu faktor penyebab bangkitnya keluarga miskin dari lingkaran kemiskinannya adalah karena perilakunya yang tidak produktif. Tidak produktifnya perilaku petani miskin dalam melangsungkan kehidupannya dipengaruhi oleh banyak faktor atau karakteristik yang ada pada diri individu tersebut. Karakteristik ini mencakup pada ciri kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Bahrain, 2008: iv).

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang sudah mewabah di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pemerintah melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin diberbagai daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Program-program tersebut bermacam-macam seperti program bantuan untuk rumah tangga miskin yang sifatnya jaringan pengaman sosial Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), Kartu Sehat, sampai kepada program yang bersifat penambahan modal usaha untuk rumah tangga miskin seperti P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Selain itu ada juga program yang berbentuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan yang berguna untuk memperlancar aksesibilitas daerah-daerah yang masih sulit untuk dijangkau atau daerah-daerah terpencil. Program-program yang telah dijalankan itu membuktikan bahwa sebenarnya pemerintah juga telah berusaha untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin di negara ini.

Namun demikian hasil yang didapat belumlah maksimal, seperti hasil penelitian yang didapat oleh Afrizal et.al (2006: 75) saat melakukan penelitian tentang pemetaan kemiskinan dan strategi pengentasannya yang berbasis institusi

lokal dan berkelanjutan dalam era otonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian yang didapat menjelaskan bahwa program yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan kemajuan secara signifikan dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian rumah tangga miskin. Penelitian tersebut menemukan bahwa bantuan yang diberikan hanya bersifat karitatif sehingga tidak memunculkan dorongan kepada orang miskin untuk berupaya mengatasi kemiskinannya dan secara umum program-program pengentasan kemiskinan belum membuat perekonomian orang miskin membaik.

Selain itu LP3ES, juga menemukan berbagai penyimpangan-penyimpangan dana kompensasi pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah pasca reformasi bergulir. Beberapa penyimpangan yang terjadi antara lain: *Pertama*, bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Sekitar 22% penerima beras untuk rumah tangga miskin yang ditetapkan oleh BPS, hanya sekitar 18% rumah tangga berkategori miskin yang menerima subsidi Raskin sekaligus memanfaatkan pelayanan kesehatan. Demikian pula halnya dengan kriteria penerima dana bergulir usaha mikro ternyata salah sasaran, yang menerima adalah rumah tangga yang terdaftar sebagai LKM yang jelas-jelas sudah memiliki usaha mandiri.

Kedua bantuan yang diberikan tidak tepat waktu. Dana kompensasi BBM yang diterima oleh keluarga miskin diberikan jauh-jauh hari setelah pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM. Dalam kasus dana kompensasi BBM tahun 2001, pencairan dananya baru ditetapkan lima bulan pasca kenaikan harga BBM. Padahal saat itu, banyak pedagang yang sudah menaikkan harga jualnya sebelum pemerintah menetapkan tanggal pastinya. Bisa dibayangkan

beban keluarga miskin akibat kenaikan harga BBM apabila pencairan dana kompensasi dilakukan berlarut-larut dalam waktu yang panjang. *Ketiga* proses penyalurannya rumit dan birokratis. Banyak masyarakat kecil yang tidak ambil peduli terhadap dana kompensasi BBM, karena mempertimbangkan berbagai kerumitan dan mekanisme birokratis pelaksanaan programnya. Sebab instansi terkait memberikan syarat yang bermacam-macam dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Akibatnya selain jalur penyalurannya amat panjang, dananya juga tidak langsung diterima oleh keluarga miskin, bahkan mereka harus membayar terlebih dahulu pihak-pihak yang diikutsertakan dalam program, dan sebagainya (Diyarsi, 2007: 5-6).

Untuk menyikapi kegagalan program akibat kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini, pada tahun 2007 pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berguna untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di daerah perdesaan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan terdapat 2 jenis program yang akan dijalankan dan didanai dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat, salah satunya adalah dana Bantuan Langsung Masyarakat pada program simpan pinjam perempuan (BLM SPP). Dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam Program Simpan Pinjam Perempuan bertujuan untuk mengembangkan potensi simpan pinjam, kemudahan akses usaha skala mikro, mendorong pengurangan rumah tangga miskin, peningkatan lapangan kerja serta mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha bagi rumah tangga miskin agar dapat meningkatkan

kesejahteraannya. Program dana Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan ini sudah diimplementasikan hampir di seluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Sumatera Barat.

Sebagai negara berkembang, seperti yang telah dijelaskan di atas, masalah-masalah sosialnya masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) membuat kriteria kemiskinan, agar dapat menyusun secara lengkap pengertian kemiskinan, supaya dapat diketahui dengan pasti jumlahnya dan cara tepat menanggulangnya. Sehingga diketahui mana yang layak mendapatkan bantuan kemiskinan dan tidak layak.

Saat penelitian dilakukan, diketahui pada Kelurahan Kampung Jua Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, terlihat adanya keberagaman jumlah data keluarga miskin di kelurahan ini yang ditentukan melalui Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Departemen Sosial (DEPSOS) dengan jumlah data keluarga miskin yang ditentukan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di mana PNPM ini melibatkan masyarakat lokal sekaligus mendapatkan kewenangan dalam menentukan keluarga miskin atau penentuan berbasis masyarakat berdasarkan kriteria yang sudah disepakati bersama unsur masyarakat.

Jumlah data angka kemiskinan yang ditentukan pemerintah (BPS, BKKBN, DEPSOS) jauh berbeda dengan data keluarga miskin menurut PNPM “Berbasis Masyarakat” di Kelurahan Kampung Jua, yaitu dari data BPS 2011 berjumlah 209 Kepala Keluarga (KK), BKKBN tahun 2012 yang terbagi atas

status keluarga pra sejahtera 19 KK dimana jumlah ini adalah kategori keluarga paling miskin dan keluarga sejahtera 1 yaitu 246 KK, dan DEPSOS tahun 2014 yaitu 34 KK miskin. Selanjutnya adalah PNPM 2012 memiliki data keluarga miskin berbasis masyarakat 446 KK. Dalam hal ini masyarakat kurang puas dengan data keluarga miskin yang ditetapkan oleh pemerintah. Sering terjadi perbedaan daftar keluarga miskin antara masyarakat dengan pemerintah dalam persepsinya tentang data kemiskinan.

Perbedaan data kemiskinan yang dihasilkan oleh PNPM yang melibatkan masyarakat setempat berbeda dengan angka kemiskinan versi pemerintah (BPS, DEPSOS, BKKBN), di mana pada berbasis masyarakat (PNPM) lebih banyak menjaring rumah tangga miskin di Kelurahan Kampung Jua. Hal ini dikarenakan penetapan yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai kriteria kemiskinan sendiri walaupun sebenarnya kriteria itu masih bersinggungan dengan kriteria pemerintah dalam hal ini BPS. Ternyata masyarakat mempunyai pengetahuan sendiri melihat kondisi keluarga miskin di Kelurahan Kampung Jua.

1.2. Rumusan Masalah

Kelurahan Kampung Jua adalah bagian salah satu dari Kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Kelurahan ini merupakan kelurahan yang masyarakat miskinnya sebagian besar bekerja sebagai buruh, petani, pedagang. Di mana pendapatan mereka dalam sebulan belum dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mengingat kebutuhan hidup yang terus meningkat, sehingga perlu program penanggulangan kemiskinan yaitu berupa

bantuan sosial. Dari sinilah terlihat keberagaman jumlah angka kemiskinan di Kelurahan Kampung Jua. Namun yang dijadikan acuan oleh kelurahan selaku pemerintah yang tertinggi adalah data keluarga miskin oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan observasi, kemiskinan di Kelurahan Kampung Jua, ada data kemiskinan yang datanya tahun 2012 melalui PNPM berjumlah 446 KK. Penetapannya bersama masyarakat memiliki perbedaan dengan data oleh pemerintah (DEPSOS, BPS, BKKBN). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah keluarga miskin di Kelurahan Kampung Jua berjumlah 209 KK miskin. Selain itu Departemen Sosial (DEPSOS) memiliki data keluarga miskin yaitu 34 KK. Selanjutnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga mempunyai kriteria miskin yang terbagi menjadi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 dimana datanya berjumlah masing-masing 19 KK untuk keluarga pra sejahtera dan KS1 berjumlah 246 KK. Berarti ada lebih banyak lagi keluarga miskin yang tidak terlihat oleh pemerintah.

Data yang dikeluarkan BPS pada saat ini dijadikan dasar dalam menetapkan sasaran penerima bantuan seperti bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai), RASKIN (Beras Miskin), JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Melihat angka kemiskinan ini, dimana terjadinya keberagaman dan perbedaan data jumlah keluarga miskin antara pemerintah dengan masyarakat, maka yang menjadi pertanyaan peneliti adalah ***Bagaimana Penentuan Keluarga Miskin Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?***

1.3. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1.3.1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan penentuan keluarga miskin berbasis masyarakat.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan kriteria miskin menurut masyarakat.
2. Mendeskripsikan proses penentuan keluarga miskin oleh masyarakat

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Aspek Akademis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan.

1.4.2. Bagi Aspek Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah yang akan melakukan program pengetasan kemiskinan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Kemiskinan

Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin (Suparlan, 1984: 12).

Kemiskinan bukanlah yang baru dan sangat sulit untuk didefinisikan walaupun demikian beberapa ahli mencoba untuk mendefinisikan kemiskinan tersebut menurut (Yusuf Qardhawi, 2005: 21) kemiskinan itu adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu dalam masyarakat yang juga mengimplikasikan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupan.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (2002) kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti suatu kondisi dimana seseorang tidak berharta benda, serba kekurangan dan berpenghasilan sangat rendah. Sedangkan dalam ajaran agama islam, kata miskin sering diiringi dengan kata fakir, yang berarti orang yang sangat berkekurangan atau sangat miskin. Dilihat dari asal usul katanya, kata miskin merupakan kosa kata bahasa Arab yang terambil dari kata "*sakana*" yang berarti diam, tenang, tidak bergerak, pasif atau statis, dengan demikian

kemiskinan berarti keadaan miskin dimana adanya ketidak mampuan yang memadai.

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang pokok. Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain. garis kemiskinan yang ditentukan oleh batas minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok bisa dipengaruhi oleh :

- a. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan.
- b. Posisi manusia dalam lingkungan sekitarnya.
- c. Kebutuhan obyektif manusia bisa hidup secara manusiawi.

(Pasaribu & Simandjuntak, 1986: 242).

Dari semua uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan memiliki arti yang berbeda-beda menurut pandangan/paradigma, pemikiran, serta pemahaman yang diberikan terhadap konsep kemiskinan tersebut karena kemiskinan adalah konsep yang abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda tergantung dari pengalaman, perspektif, sudut pandang atau ideologi yang dianut. Itu artinya kemiskinan memiliki konsep yang beragam. tetapi jika berbicara tentang kemiskinan, yang terbayang adalah hidup dalam serba kekurangan akibat ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Di Indonesia, terdapat beberapa cara untuk menentukan kondisi kemiskinan dalam masyarakat yang dilakukan oleh beberapa institusi pemerintah Negara Republik Indonesia serta badan dunia. Pendekatan inilah yang akan

menjadi dasar pembuatan program penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pendekatan-pendekatan ini telah dilakukan oleh institusi pemerintah, seperti BPS, BKKBN, DEPSOS serta pendekatan badan dunia, seperti UNDP dan Bank Dunia.

Seperti halnya BPS menggunakan garis kemiskinan absolute berdasarkan pada kebutuhan akan kalori per hari sebesar 2100/hari serta pengeluaran non makanan lainnya. Kebutuhan pokok selain makanan disini, juga ada seperti perumahan (bahan bakar, air dan penerangan), pakaian dan berbagai jasa terutama kesehatan dan pendidikan (BPS, 18: 2008).

Untuk pengeluaran jenis pangan BPS tidak hanya mengambil beras sebagai patokan sesuai dengan keinginan pemerintah melakukan keragaman pangan. Dengan demikian nilai uang dari jumlah kalori tersebut di hitung berdasarkan perbandingan atau rasio antara konsumsi total rumah tangga, sehingga di peroleh konsumsi total minimum yang dianggap sebagai garis kemiskinan.

Lain lagi dengan indikator Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN tidak menggunakan konsep kaya miskin untuk melapis penduduk secara ekonomi maupun sosial, yaitu menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan yang dibagi ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga pra sejahtera (Pra KS) dan keluarga sejahtera I (KS I). keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III), dan keluarga sejahtera III plus (KS III PLUS). (<http://repo.unsrat.ac.id/144/12/11 - BAB 2.pdf>).

Berikut tahapan penjelasan dari ke 5 indikator yang harus dipenuhi, yaitu:

A. Keluarga PRA-KS :

1. Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Belum mampu memenuhi kebutuhan makan minimal dua kali sehari.
3. Memiliki pakaian yang sama untuk dirumah,bekerja,sekolah,dan bepergian.
4. Bagian lantai rumah dari tanah.
5. Belum mampu untuk berobat di saran kesehatan.

B. Keluarga Sejahtera I (KS I):

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
2. Pada umumnya anggota keluarga makan 2kali sehari atau lebih.
3. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/pergi/bekerja/sekolah.
4. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.
5. Anak sakit ataupun pasangan usia subur (PUS) yang ber KB dibawa ke sarana kesehatan.

C. Keluarga Sejahtera II (KS II)

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
2. Paling kurang sekali seminggu mengkonsumsi lauk/daging/ikan/telur.
3. Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru.
4. Luas lantai paling kurang 8m² untuk tiap penghuni.
5. Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas.
6. Ada anggota keluarga umur 15 tahun ke atas berpenghasilan tetap.
7. Anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin.
8. Anak umur 7-15 tahun bersekolah.

9. PUS dengan anak hidup 2 atau lebih memakai alat kontrasepsi.

D. Keluarga Sejahtera III (KS III)

1. Keluarga berusaha meningkatkan pengetahuan agama.
2. Sebagian penghasilan keluarga di tabung.
3. Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
4. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
5. 5 keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan.
6. Keluarga memperoleh berita dari surat kabar/majalah/TV/radio.
7. Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat.

E. Keluarga Sejahtera (KS III plus)

8. Keluarga secara teratur memberikan sumbangan.
9. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan/institusi masyarakat.

Akan tetapi pendekatan BKKBN ini dianggap masih kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti, di samping ke 5 indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal

UNDP mengukur kemiskinan yang dirangkum dalam *Poverty Report 2000*, di lihat dari dua aspek, yaitu: miskin pendapatan dan miskin akan kemampuan manusiawi.

- a. Miskin pendapatan atau kategori miskin sekali adalah: tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, umumnya

untuk kebutuhan dasar akan kalori atau kemiskinan absolut. Kategori miskin keseluruhan adalah tidak memiliki pendapatan umumnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bukan makanan, seperti pakaian, rumah, juga kebutuhan pokok makanan atau kemiskinan relatif.

- b. Miskin kemampuan manusia, adalah tidak memiliki kemampuan dasar manusiawi, seperti buta huruf, gizi buruk, usia harapan hidup yang pendek, buruknya kesehatan seorang ibu dan rentan terhadap penyakit yang mudah di sembuhkan. Secara tidak langsung miskin kemampuan manusia adalah kekurangan akses untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan hidup, pelayanan dan sarana infrastruktur, sanitasi, komunikasi, pendidikan, air minum, yang umumnya untuk menunjang keberlanjutan kemampuan dasar manusia.

Dalam pengukuran kemiskinan, Bank Dunia memfokuskan pada tiga aspek pengukuran kemiskinan, yaitu:

- a. Kemiskinan itu sendiri yang didefinisikan sebagai ketidak cukupan sumber daya rumah tangga atau individu atau kesanggupan memenuhi kebutuhan hari ini.
- b. Ketidaksetaraan dalam pendistribusian penghasilan, konsumsi atau benda-benda lain yang beredar untuk kebutuhan masyarakat.

Menurut perhitungan World Bank bahwa kemiskinan parah, apabila hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 1 per hari, dan kemiskinan sedang hidup dengan penghasilan US\$ 2 per hari.

Selanjutnya adalah indikator yang dikemukakan oleh Sayogyo (dalam Indraddin, 2012:61-62), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disertakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dibagi atas wilayah perdesaan dan perkotaan. Bagi daerah perdesaan ditetapkan atas : (a) miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (b) miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (c) paling miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Bagi daerah perkotaan ditetapkan atas : (a) miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (b) miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (c) paling miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep kemiskinan yang dikemukakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Depsos, karena konsep ini yang umumnya dipakai oleh pemerintah dalam melihat masalah kemiskinan yang mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk kehidupan yang layak.

Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial menetapkan 14 indikator atau kriteria dari rumah tangga miskin. Apabila ini ditemukan antara 1-9, maka rumah tangga ini tergolong hampir miskin, 10-11 ini indikator tergolong miskin

dan apabila 12-14 itu indikator yang menunjukkan sangat miskin. Adapun kriteria atau indikator tersebut adalah :

1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 M² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal tersebut terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbio/kayu berkualitas rendah/tembikar tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan.
7. Bahan masak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sekali atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan jumlah lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- perbulan.
13. Pendidikan tertinggi dari kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ SD/hanya SMP.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Nasikun dalam Suryawati (2005: 76) membagi kemiskinan atas tipe: (1) kemiskinan absolute, yaitu bila pendapatan di bawah garis kemiskinan, atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperoleh untuk bida hidup dan bekerja; (2) kemiskinan relative, kondisi

miskin yang disebabkan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat ketimpangan pada pendapatan; (3) kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas boros, tidak kreatif mesti ada bantuan dari luar; dan (4) kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Selain itu kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Sebuah negara misalnya secara keseluruhan bisa dikategorikan miskin. Untuk menghindari stigma, negara-negara ini tidak dinamakan lagi sebagai negara miskin “Poor Country” atau negara terbelakang “Underdeveloped Country”, melainkan disebut sebagai negara berkembang “Developing Country”.

Kemiskinan yang bersifat massal dan parah pada umumnya terdapat di Negara berkembang. Namun, terbukti bahwa kemiskinan juga hadir di negara maju. Di negara-negara berkembang, kemiskinan sangat terkait dengan aspek struktural. Misalnya, akibat sistem ekonomi yang tidak adil. Merajalelanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), adanya diskriminasi sosial, atau tidak adanya jaminan sosial. Sementara itu di Negara-negara maju, kemiskinan lebih bersifat individual. Misalnya, akibat mengalami kecacatan (fisik atau mental), ketuaan, sakit yang parah dan berkepanjangan, atau kecanduaan alkohol. Kondisi seperti

ini biasanya melahirkan kaum tuna wisma yang berkelana kesana kemari atau keluarga-keluarga tunggal (*single parents* atau *single families*, dan umumnya dialami ibu-ibu tunggal atau *single mothers*) yang mana hidupnya tergantung pada bantuan sosial dari pemerintah, seperti kupon makanan atau tunjangan keluarga (Suharto, 2009: 16).

1.5.2. Landasan Teori

Dalam Teori Strukturasi melihat hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur berupa relasi dualitas, bukan dualism. Dualitas itu terjadi dalam “praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu.” Praktik sosial itu bisa berupa sebuah kebiasaan, dan bisa praktik sosial itu sendiri bisa berlangsung di mana saja.

Dualitas terletak dalam fakta bahwa suatu ‘struktur mirip pedoman yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil perulangan berbagai tindakan kita, namun sebaliknya skemata yang mirip “aturan” itu juga menjadi sarana (medium) bagi berlangsungnya praktik sosial (Priyono, 2002: 22).

Giddens mengatakan, “Setiap riset dalam ilmu sosial atau sejarah selalu menyangkut penghubungan tindakan (seringkali disinonimkan dengan agen) dengan struktur. Namun dalam hal ini tak berarti bahwa struktur ‘menentukan’ tindakan atau sebaliknya” (Ritzer, 2010: 507).

Teori Strukturasi Giddens yang memusatkan perhatian pada praktik sosial yang berulang itu pada dasarnya adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur. Menurut Giddens, agen dan struktur adalah dwi rangkap, dalam artian seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur saling jalin menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia. Jadi secara umum dapat dinyatakan bahwa Giddens memusatkan perhatian pada proses dialektika di mana praktik sosial, struktur, dan kesadaran diciptakan. Jadi Giddens menjelaskan masalah agen-struktur secara historis, processual, dan dinamis (Ritzer, 2010: 508).

Struktur, sifat struktur adalah mengatasi waktu dan ruang (*timeless and speceless*) serta maya (*virtual*), sehingga bisa diterapkan pada berbagai situasi dan kondisi. Berbeda dengan pengertian Durkhemia tentang struktur yang lebih bersifat mengekang (*constraining*), struktur dalam gagasan Giddens juga bersifat memberdayakan (*enabling*) : memungkinkan terjadinya praktik sosial. Itulah Giddens melihat struktur sebagai sarana (*medium dan resources*). Meskipun bersifat obyektif, obyektivitas struktur sosial berbeda dengan watak obyektif struktur dalam mazhab fungsionalisme maupun strukturalisme, di mana struktur menentang dan mengekang pelaku. Bagi Giddens, obyektivitas struktur tidak bersifat eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktik sosial yang kita lakukan. Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consiousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*).

Pada penelitian ini, penentuan keluarga miskin berbasis masyarakat di Kelurahan Kampung Jua dapat ditelaah dengan menggunakan teori strukturasi yang di kemukakan oleh Giddens. Adanya Agen dalam teori strukturasi merupakan orang-orang yang yang berada di Kelurahan dan RT/RW, BKM, LPM, baik itu anggota rumah tangga miskin, Tokoh Masyarakat yang banyak menduduki jabatan di badan dan lembaga tersebut.

Manusia dipahami sebagai suatu makhluk yang memiliki kebebasan berfikir, bertindak dan merefleksikan diri dengan *knowledgeabilitas* sendiri berdasarkan pemahaman akan historisnya. Manusia/agen termasuk anggota RTM (Rumah Tangga Miskin) atau pelaku PNPM Mandiri Perdesaan memiliki kemampuan mengambil jarak dan berfikir tentang diri, situasi dan posisinya dalam ruang dan waktu yang menjadi dasar reflektifitas terhadap kehidupan yang dilibatinya.

Proses sosial akan terjadi secara berkesinambungan dimana struktur akan menginternalisasikan nilai-nilai pada agen. Agen juga akan melakukan tindakan sosial sehingga terciptalah aturan-aturan yang di sepakati secara bersama di komunitas. Aturan tersebut akan menjadi sebuah struktur yang berguna untuk indikator masyarakat menentukan keluarga miskin. Dalam penelitian ini masyarakat di Kelurahan Kampung Jua yang menentukan keluarga miskin berbasis masyarakat, yang didampingi oleh PNPM menemukan jumlah RTM 446 KK. Sehingga terjadi terdapatnya keberagaman data keluarga miskin di keluarkan oleh pemerintah yaitu BPS 446 KK. Perlu diketahui selama ini BPS lah yang menjadi data dasar utama dalam memberikan bantuan sosial oleh pemerintah.

Dengan demikian agen yang disubyekkan sebagai masyarakat dapat melakukan tindakan sesuai dengan harapannya karena struktur atau sistem tadi tidak mengekang melainkan memberdayakan dalam artian memberikan jalan dalam hal ini menentukan keluarga miskin di Kelurahan Kampung Jua.

1.5.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait dengan program pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut. Pertama adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Diyarsi (2007) mengenai Perilaku Rumah Tangga Miskin dalam Memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak (BLT-PKPS BBM) (Kasus Di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang). Dalam hasil penelitiannya Isnila menyebutkan rata-rata semua informan memanfaatkan BLT PKPS-BBM yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti untuk makan, membeli baju, merehab rumah, biaya pendidikan anak, membeli ternak, biaya berobat, membeli pupuk, benih, modal usaha dan untuk membayar hutang serta disimpan atau ditabung.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Muharma Ikhsan (2011) tentang “Marginalisasi Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Di Sumatera Barat (*Studi pada Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam*)”. Didalam hasil penelitiannya Ikhsan menyebutkan bahwa adanya RTM yang termarginalkan, pergerakan masyarakat terutama RTM hanya bersifat artifisial yaitu partisipasi RTM hanya

semata-mata untuk kesuksesan program atau kegiatan. Sehingga dapatlah kita lihat adanya RTM yang masih termarginalkan. Indikasi termarginalnya RTM terlihat pada;

1. Tidak pernah dilakukan pengkajian partisipatif secara maksimal
2. RTM tidak benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
3. RTM dilibatkan sebagai pekerja untuk mendapat upah harian.
4. RTM tidak dipercaya untuk mendapat pinjaman SPP, karena takut tidak akan mampu membayar hutang.
5. Proses Musyawarah yang berperan adalah *elite* dan aktivis yang juga memiliki kepentingan.
6. Proses musyawarah dilakukan sekedar formalitas.

Perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada fokus penelitiannya, dimana pada penelitian diatas oleh Isnila Diyarsi (2007) lebih memfokuskan pada perilaku rumah tangga miskin dalam memanfaatkan bantuan langsung tunai dan melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin penerima BLT. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muharma Putra (2011) lebih menekankan pada RTM yang termarginalkan, pergerakan masyarakat terutama RTM hanya bersifat artifisial yaitu partisipasi RTM hanya semata-mata untuk kesuksesan program atau kegiatan. Sehingga dapatlah kita lihat adanya RTM yang masih termarginalkan. Dalam penentuannya, Proses Musyawarah yang berperan adalah *elite* dan aktivis yang juga memiliki kepentingan dan Proses musyawarah dilakukan hanya sekedar formalitas.

Sementara itu, dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap penentuan keluarga miskin berbasis masyarakat. Dalam hal ini penentuan keluarga miskin yang lebih memfokuskan terhadap keterlibatan masyarakat lokal/setempat dan

seperti apa kriteria miskin menurut masyarakat yang selalu dikedepankan dalam sebuah musyawarah di hadiri oleh ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dsb.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, bukan menganalisis angka-angka. Selain itu data yang dikumpulkan juga dapat berupa aktivitas-aktivitas manusia.

Pendekatan kualitatif (naturalistik) merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang diteliti dalam menjawab permasalahan untuk mendapat data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu (Iskandar, 2009 : 17). Sementara itu tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti mendeskripsikan secara keseluruhan data yang didapat dari lapangan, yaitu mulai dari bagaimana masyarakat lokal merumuskan kepala keluarga (kk) miskin yang difasilitasi oleh PNPM dan proses penentuan kriteria keluarga miskin oleh masyarakat dengan teknik wawancara mendalam di Kelurahan Kampung Jua Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

1.6.2. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan sebagai subjek penelitian yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang baik tentang dirinya atau orang lain ataupun kejadian kepada peneliti (Sapradley, 1997: 25-37).

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik tertentu yang tujuannya adalah menjangkau sebanyak mungkin informasi yang menjadi dasar penulisan laporan. Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu mekanisme pencarian informan penelitian seperti ini dilakukan dengan mengetahui kriteria siapa saja yang dapat pantas dijadikan informan penelitian (Afrizal, 2008: 101).

Untuk memperoleh suatu data yang valid dengan peneliti menggunakan metode triangulasi data, dimana data yang dikumpulkan haruslah dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 1995: 178). Jadi data yang diperoleh peneliti dibandingkan dengan informan lain apakah data yang diperoleh sudah benar atau terdapat perbedaan. Informasi ini dapat diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Lurah, BKM. Selain itu

tokoh masyarakat seperti ninik mamak, alim ulama juga menjadi acuan guna mendapatkan informasi yang lebih pasti karena merupakan tokoh yang mempunyai banyak keterlibatannya pada banyak kegiatan pembangunan dalam hal ini berbasis masyarakat.

Dalam penelitian ini jumlah informan yang peneliti tentukan berjumlah 15 orang. Informan tersebut adalah informan yang termasuk dalam gambaran kriteria informan yang telah ditetapkan. Gambaran kriteria terhadap pemilihan informan yaitu: BKM, Lurah, Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang, Tokoh Pemuda), RT/RW (relawan), Keluarga Miskin, LPM, dan Pegawai Kelurahan Bidang Kesejahteraan Sosial.

1.6.3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data atau informasi dalam penelitian, maka data yang dikumpulkan dapat diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan saat proses penelitian berlangsung yang dapat diambil melalui proses wawancara mendalam maupun dengan melakukan observasi. Dalam penelitian ini data primer yang diambil adalah penentuan keluarga miskin berbasis masyarakat, kriteria miskin menurut masyarakat dan proses penentuan keluarga miskin berbasis masyarakat.

Data sekunder yang diperoleh dari media yang dapat mendukung dan relevan dengan penelitian ini, serta dapat diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur-literatur hasil penelitian dan artikel.

Data ini berupa buku-buku, laporan, hasil penelitian atau dokumen yang relevan dan sama dengan penelitian ini.

1.6.4. Teknik dan Proses Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik *observasi* adalah pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indra. Dengan *observasi* kita dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian (Affifuddin dan Ahmad Saebani, 2009: 134). Teknik observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian.

Data *observasi* berupa data faktual, cermat dan terperinci tentang keadaan lapangan, *observasi* yang digunakan adalah *partcipant as observer* yaitu penelitian memberitahu maksud dan tujuan pada kelompok yang diteliti. Teknik *observasi* adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data lapangan dengan cara langsung kelokasi penelitian.

Waktu dan keadaan akan ditentukan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian adalah pada rentang waktu yang berkisar antara siang menjelang sore dan sore menuju malam hari. Waktu tersebut merupakan berlangsungnya aktivitas pekerja dikantor kelurahan. Untuk melihat kondisi masyarakat lebih tepat di sore hari. Biasanya masyarakat di Kelurahan Kampung Jua yang bertani dan berdagang juga telah kembali ke rumahnya

masing-masing. Selain itu tokoh masyarakat yang bekerja sebagai pegawai serta pengusaha juga sudah berada di rumahnya. Peneliti pada saat itu dapat mendatangi rumah masyarakat jika ada tujuan yang dibutuhkan.

Observasi yang peneliti lakukan yaitu meninjau keadaan rumah tangga miskin yang masuk pada data rumah tangga miskin berbasis masyarakat dan yang tidak masuk ke dalam data tetapi kondisinya miskin. Selain itu juga untuk melihat asset-asset apa saja yang ada pada sebuah keluarga miskin Kelurahan Kampung Jua. Dilakukannya pengamatan ini agar memudahkan untuk mendapatkan informasi yang jelas sesuai dengan masalah penelitian. Berkaitan dengan ini untuk mendapatkan informasi dengan tujuan penelitian yaitu penentuan keluarga miskin berbasis masyarakat, di mana peneliti melakukan observasi terhadap kondisi kehidupan masyarakat miskin, yang pada umumnya bermata pencaharian adalah sebagai buruh dan petani.

Adapun data yang di observasi oleh peneliti adalah berupa asset yang dimiliki, kondisi rumah, bentuk pekerjaan, dan aktivitas keseharian warga. Untuk itu peneliti harus memiliki wawasan konseptual tentang fokus dan masalah yang diteliti serta dapat memahami permasalahan penelitian. Dalam melakukan observasi peneliti dapat dibantu dengan menggunakan alat kamera digital.

b. Wawancara Mendalam

Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan bagian yang penting dalam melakukan penelitian. Karena melalui wawancara diperoleh informasi-informasi yang penting untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (masyarakat) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 1995: 135). Teknik wawancara merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian. Karena melalui wawancara diperoleh informasi-informasi yang penting untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian.

Wawancara yang akan dilakukan terhadap informan adalah wawancara mendalam. Dikatakan wawancara mendalam karena dilakukan berulang-ulang kali antara pewawancara dengan informan. Pernyataan berulang – ulang tidaklah berarti mengulangi pertanyaan yang sama dengan beberapa informan atau informan yang sama, akan tetapi menanyakan hal-hal yang berbeda atau mengklarifikasi informasi yang sudah didapat dalam wawancara sebelumnya kepada informan yang sama. Dengan demikian, pengulangan wawancara dilakukan untuk mendalami atau mengkonfirmasi (Afrizal, 2008: 98).

Sesuai dengan fokus permasalahan penelitian, peneliti menarik informasi dari informan melalui wawancara mendalam dengan memberikan kesempatan kepada informan untuk menanyakan tentang bagaimana masyarakat menentukan keluarga miskin yang di fasilitasi oleh program PNPM dalam mencari jumlah kk miskin yang berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah (BPS) yang selama ini menjadi data utama oleh kelurahan, serta menceritakan bagaimana proses penentuan kriteria miskin oleh masyarakat. Selama wawancara berlangsung, sebagai peneliti/pewawancara harus mendengarkan jawaban yang diberikan

informan dengan baik dan sikap yang sopan, yaitu dengan tidak menyela-nyela pembicaraan informan di waktu ia belum selesai menjelaskannya. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidak nyamanan terhadap informan saat wawancara dilakukan.

Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah Lurah, LPM, Pengelola Program “BKM”, RT/RW, Keluarga Miskin, Tokoh Masyarakat (Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang, Ninik Mamak, Tokoh Pemuda), Pegawai Kelurahan Bidang Kesejahteraan Sosial. Diawali dengan memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud peneliti melakukan wawancara. Selain itu peneliti juga mewawancarai masyarakat yang masuk ke dalam kategori kemiskinan, dalam hal ini yang masuk ke dalam versi RTM berbasis masyarakat tersebut. Guna mengetahui dan memahami kondisi kehidupan mereka yang sesungguhnya.

Pada saat penelitian berlangsung peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang membantu proses wawancara seperti daftar pedoman wawancara, buku catatan, pena, kamera dan alat rekaman.

Tabel 1.1
Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

No.	Tujuan Penelitian	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Mendeskripsikan kriteria miskin menurut masyarakat	Pandangan terhadap orang miskin.	Tokoh Masyarakat Kelurahan	Wawancara
		Kriteria miskin menurut masyarakat	BKM Tokoh Masyarakat RT/RW	Wawancara
		Mengapa dikatakan sebagai keluarga miskin	Tokoh Masyarakat BKM Kelurahan RT/RW	Wawancara
2.	Mendeskripsikan proses penentuan kriteria miskin oleh masyarakat	Proses menentukan kriteria dan keluarga miskin	BKM Lurah Tokoh Masyarakat	Wawancara
		Proses pelibatan masyarakat dalam menentukan keluarga miskin	BKM Kelurahan RT/RW	Wawancara

1.6.5. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam menganalisa data. Dengan kata lain unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan dengan menentukan objek yang diteliti yang kriterianya telah ditentukan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisisnya

adalah masyarakat. Terdiri dari LPM, Pengelola Program “BKM”, RT/RW, Keluarga Miskin, Tokoh Masyarakat (Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung, Ninik Mamak, Tokoh Pemuda).

1.6.6. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kesintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Iskandar, 2009: 221-222).

Analisis data merupakan pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagian dari data yang telah dikumpulkan, hubungan antara bagian-bagian data yang telah dikumpulkan, serta hubungan antara bagian-bagian data tersebut dengan keseluruhan data. Semua itu dilakukan dengan cara mengkategorisasi informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian mencari hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat (Afrizal, 2008: 79).

Data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun hasil pengamatan di lapangan dicatat kedalam catatan lapangan (*field note*) kemudian dikumpulkan, dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh kemudian baru dianalisa secara kualitatif. Catatan lapangan ini sangat penting karena ia merupakan bahan mentah analisis data dalam penelitian kualitatif. Setelah data dicatat kedalam catatan

lapangan, kemudian peneliti menulis ulang kembali catatan lapangan sampai bentuk yang tersusun rapi dan mendetail sebagai bahan analisis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak terpisah dari aktivitas pengumpulan data, karena analisis data selama melakukan penelitian tersebut merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif, karena aktivitas ini sangat menolong si peneliti untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas (valid) disebabkan oleh peneliti telah mulai memikirkan data dan menyusun strategi guna mengumpulkan data selanjutnya pada masa proses pengumpulan data (Afrizal, 2008: 82).

1.6.7. Lokasi Penelitian

Daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena berdasarkan survey yang telah dilakukan, kelurahan ini menurut BPS 2011 memiliki jumlah kk miskin yaitu 209 KK. Namun, di lokasi ini adanya jumlah KK miskin yang lebih banyak lagi dimana penentuannya melibatkan masyarakat yang didampingi oleh PNPM 2012 dalam menetapkan dan menentukan keluarga miskin yaitu berjumlah 446 KK. Melihat adanya perbedaan jumlah angka kemiskinan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti seperti apa kriteria yang ditentukan oleh masyarakat sehingga jauh lebih banyak mendapatkan jumlah keluarga miskin di Kelurahan Kampung Jua.

1.6.8. Definisi Operasional

1. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang berada pada kondisi miskin, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan dan keterbatasan rumah tangga dalam berbagai hal yang menunjang kesejahteraan hidupnya. Kondisi ini oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi kedalam 14 indikator yang telah ditetapkan.
2. Terbatasnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, seperti kategori sangat miskin hanya mampu memenuhi konsumsi 1900 kalori perorang perhari ditambah pengeluaran non makanan atau senilai Rp.120.000 perorang perbulan. Untuk kategori miskin hanya mampu tidak lebih dari 2100 kalori perorang perhari di tambah pengeluaran non makanan atau setara dengan Rp. 150.000 perorang perbulan. Sedangkan hampir miskin hanya mampu mengkonsumsi 2100 sampai 2300 kalori atau setara dengan Rp. 175.000 perorang perbulan (Suharto, 2005: 134).
3. Asset merupakan hak atau klaim yang berhubungan dengan property, baik dalam kongkrit maupun abstrak. Asset terdiri dari modal investasi yang pada gilirannya akan menghasilkan laju pemasukan dimasa depan (Sherraden 2006: 134).
4. Program-program yang diterapkan pemerintah antara lain seperti program bantuan untuk rumah tangga miskin yang sifatnya jaringan pengaman sosial Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), Kartu

Sehat, sampai kepada program yang bersifat penambahan modal usaha untuk rumah tangga miskin seperti P2KP.

5. Dalam beberapa program BKKBN, juga punya kriteria miskin. Namun pada saat sekarang kriteria yang dipakai menjadi dasar pemerintah hingga kelurahan adalah BPS, meliputi 14 indikator. Namun masyarakat berdasarkan pengetahuannya mempunyai kriteria sendiri yang relevan dengan kondisi masyarakat lokal, walaupun sebenarnya kriteria itu masih bersinggungan dengan indikator pemerintah. Akan tetapi pengetahuan masyarakat lebih relevan sehingga data keluarga miskin berbasis masyarakat menjadi 446 kk.
6. Berbasis masyarakat adalah Penentuan keluarga miskin dengan keterlibatan masyarakat setempat dalam menentukan apa saja yang menjadi kriteria sebuah keluarga miskin yang nantinya berujung terhadap pemberdayaan kepada keluarga miskin itu sendiri.

1.6.9. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian dalam proses penelitian ini dapat dilihat dalam table 1.2

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Tahun 2014											
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	Survei awal												
2	Pembuatan TOR												
3	Bimbingan												
4	Seminar proposal												
5	Perbaikan proposal												
6	Penelitian												
7	Analisis Data												
8	Ujian Skripsi												